



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 4986-5004

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Analisis Collaborative Governance di Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Bandung

Muhammad Farhan Akbar Maulana^{1✉}, Sri Wandasari Putri², Andre Ariesmansyah³

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan

Email: muhammadfarhan.a03@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini dilakukan sebagai salah satu sarana informasi mengenai proses pemanfaatan konsep collaborative governance yang dilakukan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, apakah proses kolaborasi yang dilakukan telah berjalan dengan efektif dan berhasil atau mengalami sebuah kegagalan. Collaborative governance merupakan sebuah konsep kolaborasi yang didalamnya mengajak dan melibatkan berbagai pihak lain dalam menjalankan berbagai program atau kegiatan yang akan dilaksanakan. Tujuan dilaksanakannya konsep collaborative governance ini untuk menciptakan pelaksanaan program yang lebih maksimal dan menciptakan pencapaian hasil akhir yang lebih optimal dan sesuai dengan tujuan yang direncanakan. Oleh karena itu, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung melaksanakan konsep collaborative governance ini sebagai sarana pencapaian program menjaga, melestarikan dan mengembangkan sektor budaya dan pariwisata yang lebih optimal dan dapat menjangkau banyak pihak. Metode penelitian yang dilakukan adalah dengan cara melakukan wawancara dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung untuk mendapatkan informasi mengenai proses kolaborasi yang dilaksanakan dengan pihak lain yang kemudian diolah dengan menggunakan teknik analisis deskriptif. Hasil penelitian yang didapatkan menyebuktikan bahwa proses collaborative governance di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung telah berjalan dengan efektif yang dibuktikan dengan melakukan penilaian dengan menggunakan teori Ansell And Gash (2008). Namun masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam proses kolaborasi yang dilakukan seperti adanya egoisme, regulasi yang tidak sesuai dan kualitas sumber daya manusia yang terbatas.

Kata Kunci : *Tata Kelola Kolaborasi, Kebudayaan, Pariwisata, Organisasi Publik.*

Abstract

This research was conducted as a means of information regarding the process of utilizing the collaborative governance concept carried out at the Bandung City Culture and Tourism Office, whether the collaboration process carried out has been effective and successful or has experienced failure. Collaborative governance is a collaboration concept that involves inviting and involving various other parties in carrying out various programs or activities that will be implemented. The aim of implementing the collaborative governance concept is to create maximum program implementation and achieve final results that are more optimal and in line with the planned goals. Therefore, the Bandung City Culture and Tourism Office is implementing this collaborative governance concept as a means of achieving a program to maintain, preserve, and develop the culture and tourism sector which is more optimal and can reach many parties. The research method used was conducting interviews with the Bandung City Culture and Tourism Office to obtain information regarding the collaboration process carried out with other parties which was then processed using descriptive analysis techniques. The research results obtained prove that the collaborative governance process at the Bandung City Culture and Tourism Office has been running effectively as proven by conducting an assessment using the Ansell and Gash (2008) theory. However, there are still several obstacles faced in the collaboration process, such as egoism, inappropriate regulations and limited quality of human resources.

Keyword: *Collaborative Governance, Culture, Tourist, Public Organization.*

PENDAHULUAN

Di dalam sebuah organisasi yang biasanya ditandai dengan banyaknya individu yang tergabung menjadi satu, tentunya diperlukan suatu proses kerjasama yang terjalin antar setiap individunya yang ditujukan agar berbagai kegiatan yang dilakukan guna mencapai tujuan organisasi dapat tercapai dengan baik dan sesuai dengan perencanaan awal yang telah ditentukan. Kerjasama tim atau tim kerja adalah kelompok yang usahausaha individualnya menghasilkan kinerja lebih tinggi daripada jumlah masukan individual (Stephen dan Timothy, 2008:406). Sedangkan menurut Tenner dan Detoro (1992:183), team works is a group of individuals working together to reach a common goal. Definisi kerjasama tim tersebut menjelaskan bahwa kerjasama tim adalah sekelompok orang-orang yang bekerja bersama untuk mencapai tujuan yang sama dan tujuan tersebut akan lebih mudah diperoleh dengan melakukan kerjasama tim daripada dilakukan sendiri. Oleh karena itu, kita dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwa adanya proses kerjasama yang dilakukan oleh setiap anggota dalam sebuah organisasi tentunya merupakan hal yang sangat penting, dimana akan menciptakan beban kinerja yang lebih ringan sehingga

kualitas kinerja yang ditunjukkan oleh anggota dapat lebih maksimal dan sesuai dengan tujuan. Adanya proses kerjasama yang dilakukan oleh setiap anggota yang berada di dalam suatu organisasi tentunya sangat penting untuk diterapkan di semua jenis organisasi, salah satunya adalah organisasi publik. Hal ini dikarenakan organisasi publik merupakan suatu organisasi yang memiliki tujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang tentunya memiliki berbagai tugas yang beragam. Oleh karena itu, diperlukan suatu kerjasama antar setiap pegawainya agar terciptanya kualitas kinerja yang optimal dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Suatu organisasi publik tentunya harus memiliki sebuah pondasi yang kuat dan kokoh dalam hal sumber daya manusia yang ada di dalamnya atau biasa di sebuah dengan pegawai, karena dengan adanya pegawai yang memiliki kinerja yang baik dan tanggung jawab yang baik dalam menjalankan berbagai tugasnya, maka akan menciptakan sebuah roda organisasi publik yang berjalan dengan optimal dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Kualitas kinerja pegawai tidak hanya di nilai dari seberapa baik dan bagaimana cara dia untuk melaksanakan berbagai tugas individunya saja, namun juga seorang pegawai dapat dikatakan memiliki kualitas kinerja yang baik apabila mampu untuk bekerja sama secara tim dengan pegawai lainnya dalam melaksanakan berbagai tugas tim yang diberikan. Hal ini dikarenakan terkadang dalam suatu organisasi publik, setiap pegawai akan dihadapkan dengan tugas atau kegiatan yang bersifat tim dan tentunya diperlukan sebuah kerjasama yang baik antar setiap pegawainya dalam melaksanakan tugas yang diberikan sehingga tentunya cara setiap pegawai dalam melakukan kerjasama akan dinilai serta menjadi penentu kualitas kinerja yang dihasilkan. Dalam menghadapi tuntutan untuk dapat melakukan kerjasama dengan pegawai lainnya dalam melaksanakan tugas yang diberikan sebagai implementasi untuk mencapai organisasi publik, tentunya setiap pegawai harus memiliki suatu strategi yang dapat digunakan sebagai acuan dalam melakukan kerjasama dengan pegawai lainnya sehingga diharapkan dapat menciptakan suatu kerjasama yang baik dan efektif antar setiap pegawainya serta dapat membuat tujuan organisasi menjadi tercapai yaitu dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Beberapa strategi yang dapat digunakan oleh para pegawai untuk menjalankan kerjasama yang optimal, antara lain :

1. Menyamakan Visi dan Tujuan yang Ingin Dicapai.

Untuk menjalin sebuah kerjasama yang baik dan efektif tentunya diperlukan suatu cara pandang atau pemahaman yang sama mengenai visi yang dijalankan dan tujuan yang akan dicapai sehingga dapat menciptakan pola tindakan atau cara kerja yang sama dalam melaksanakan tugas yang diberikan. Adanya kesamaan mengenai visi yang dijalankan dan

tujuan yang ingin dicapai oleh setiap anggotanya akan menciptakan suatu keselarasan mengenai fokus dan arah yang akan dituju pada saat melaksanakan berbagai tugas dalam diri setiap anggotanya sehingga tidak akan terjadi miss komunikasi dan tindakan yang saling bertabrakan yang dilakukan oleh setiap anggota dalam sebuah tim. Oleh karena itu, penyamaan visi dan tujuan yang ingin dicapai bagi setiap anggota tim menjadi suatu hal yang sangat penting untuk dilakukan dan dapat menjadi sebuah strategi yang tepat untuk dapat membangun kerjasama yang baik dan efektif dengan pegawai lainnya.

2. Saling Berbagi Pengetahuan.

Dalam sebuah organisasi sektor publik tentunya setiap pegawai memiliki berbagai pengetahuan dan keahlian yang berbeda dan beragam antar pegawainya, karena setiap pegawai pastinya berasal dari latar belakang yang berbeda, memiliki cara pandang yang berbeda, memiliki kebiasaan yang berbeda dan lain sebagainya. Adanya berbagai pengetahuan dan keahlian yang berbeda di setiap diri pegawai ini tentunya harus dimanfaatkan dengan baik oleh organisasi agar dapat dimanfaatkan sebagai potensi yang dapat menunjang kualitas organisasi dan bukan menjadi suatu sumber masalah yang baru. Setiap pegawai yang tergabung dalam sebuah tim dapat saling membagikan seluruh pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki melalui kegiatan diskusi atau brainstorming untuk dapat digunakan oleh pegawai lainnya dalam proses kerjasama yang sedang dilakukan sehingga terciptanya perputaran pengetahuan dan informasi baru bagi setiap pegawainya yang dapat menunjang kualitas hubungan kerja antar pegawainya dan meningkatkan kreativitas. Oleh karena itu, kegiatan saling berbagi pengetahuan dan keahlian ini merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk dilakukan dalam sebuah proses kerjasama dan dapat menjadi strategi yang tepat dalam meningkatkan kualitas kerjasama yang efektif antar setiap pegawainya.

3. Saling Menghargai Perbedaan dan Membangun Rasa Kepercayaan.

Di dalam suatu organisasi publik tentunya akan ditemukan berbagai perbedaan dan keragaman diantara setiap sumber daya manusia atau pegawainya, karena setiap pegawai yang berada dalam suatu organisasi publik pasti berasal dari daerah yang berbeda, memiliki budaya yang berbeda, memiliki adat istiadat yang berbeda, memiliki agama yang berbeda dan lain sebagainya. Adanya perbedaan yang hadir dalam suatu organisasi publik ini tentunya menjadi sebuah hal yang harus dihormati oleh setiap pegawainya, dimana mereka harus saling dapat menghargai satu sama lain sehingga terciptanya rasa nyaman dalam bekerja di setiap diri pegawainya. Dengan menghormati dan menghargai setiap perbedaan yang dimiliki, maka setiap pegawai akan merasa dirinya lebih dihargai dan dapat diterima oleh pegawai lainnya sehingga akan menciptakan suatu kualitas kinerja yang baik, salah satunya

dalam melakukan kegiatan kerjasama. Selain itu, dengan adanya sikap untuk saling menghargai juga dapat menciptakan sebuah rasa kepercayaan diantara setiap anggotanya untuk melakukan kerjasama dengan baik sesuai dengan tugas yang telah diberikan. Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa kepercayaan merupakan elemen yang sangat penting harus muncul dalam sebuah kerjasama yang dilakukan, hal ini disebabkan karena dengan adanya sebuah kepercayaan antar setiap individunya maka setiap pegawai akan merasa lebih nyaman dan lebih aman untuk melakukan kerjasama, saling berbagai tugas dan saling berbagi informasi dengan pegawai lainnya sehingga akan terwujudnya suatu proses kerjasama yang optimal. Oleh karena itu, menunjukkan sikap saling menghargai dan saling menjaga kepercayaan diantara pegawainya menjadi sebuah strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas kerjasama yang dilakukan.

4. Membangun Komunikasi yang Efektif.

Suatu kerjasama yang baik tentunya akan terjalin secara optimal dan efektif apabila didalamnya terbangun komunikasi yang efektif antara setiap pegawainya, hal ini disebabkan karena suatu komunikasi yang terjalin dengan baik akan membuat setiap pegawainya dapat memiliki cara pandang dan pemahaman yang sama dalam menjalankan tugas yang diberikan. Komunikasi merupakan salah satu elemen utama dalam melaksanakan proses kerjasama, karena dengan membangun suatu komunikasi maka akan menciptakan kesamaan dalam melakukan tindakan dan pengambilan keputusan serta meminimalisir terjadinya kesalahan pahaman atau perbedaan tindakan dalam melaksanakan tugas yang diberikan. Selain itu, dengan adanya komunikasi yang dibangun dengan efektif juga akan membuat hubungan antara setiap pegawainya menjadi lebih harmonis sehingga setiap anggota akan merasa lebih nyaman dalam menyampaikan berbagai pandangan dan pembagian tugas kepada pegawai lainnya dalam proses kerjasama yang dilakukan. Oleh karena itu, adanya komunikasi yang terbangun dengan efektif menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan dalam proses kerjasama yang dilakukan di suatu organisasi publik karena dapat meningkatkan kualitas kerjasama yang dilakukan.

5. Melakukan Evaluasi dan Memberikan Feedback.

Dalam proses kerjasama yang dijalankan di suatu organisasi publik tentunya berbagai tindakan maupun Keputusan yang diambil tidak semuanya dapat menjadi hasil yang positif bagi tercapai tujuannya organisasi publik, akan terdapat berbagai kekurangan atau kesalahan yang timbul dari tindakan yang dilakukan dan Keputusan yang diambil. Oleh karena itu, diperlukan suatu evaluasi yang dapat menjadi acuan mengenai kesalahan dan kekurangan yang dimiliki dari proses kerjasama yang dilakukan sehingga akan menimbulkan berbagai indikator yang harus diperbaiki dalam proses kerjasama yang dilakukan

kedepannya yang tentunya dapat membuat kualitas kerjasama menjadi semakin optimal dan efektif. Selain evaluasi, adanya feedback yang diberikan dan dimunculkan oleh setiap pegawainya merupakan suatu hal yang penting dalam meningkatkan kualitas kerjasama yang dilakukan, karena dengan setiap adanya feedback yang diberikan oleh setiap pegawainya terhadap tindakan yang dilakukan oleh pegawai lainnya, maka akan menciptakan suatu hubungan yang baik karena setiap anggotanya dapat merasa lebih dihargai atas tindakan atau Keputusan atau cara pandang yang disampaikan sehingga akan menciptakan suatu proses kerjasama yang memiliki optimalisasi yang baik.

Selain proses kerjasama penting untuk dilakukan di lingkungan internal organisasi publik yaitu suatu kerjasama yang dilakukan antar pegawainya, proses kerjasama juga penting untuk dilakukan di lingkungan eksternal organisasi yaitu suatu proses kerjasama yang dilakukan oleh suatu organisasi publik dengan organisasi lainnya. Adanya proses kerjasama yang dilakukan dengan melibatkan organisasi atau pihak lain ini ditujukan untuk menciptakan hubungan dan cara pandang yang lebih luas karena terdapat berbagai peran fungsi yang akan ditunjukkan oleh masing – masing pihak dalam proses kerjasama yang dilakukan. Suatu kerjasama dengan melibatkan pihak lain ini dapat diwujudkan dengan melakukan sebuah program kolaborasi yang dimana bentuk kerjasama yang dilakukan akan bersifat lebih luas dan terstruktur karena didalamnya akan melibatkan anggota yang lebih bersifat menyeluruh dan aktif, akan menciptakan ruang komunikasi yang lebih intens dan luas, akan menghasilkan cara pandang yang lebih terbuka, akan menciptakan pola kerjasama yang lebih terstruktur dan akan melahirkan hasil yang lebih besar. Dalam menjalankan programnya, tentunya suatu organisasi publik tidak bisa untuk melaksanakan dan menciptakan hasil yang sempurna sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan jika tanpa melibatkan pihak lain untuk membantu pelaksanaan program kerja. Hal ini disebabkan karena terdapat beberapa peran, fungsi dan wewenang yang tidak bisa dilakukan atau tidak dimiliki oleh suatu organisasi publik, sebagai contoh organisasi publik tidak memiliki sarana yang maksimal dalam melakukan penyebaran informasi kepada publik, organisasi publik tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan yang maksimal dalam memberikan pemahaman kepada publik, organisasi publik tidak memiliki ruang yang terbuka dengan luas untuk mencari dana atau modal, dan organisasi publik tidak memiliki kemampuan untuk mencakup atau menjangkau masyarakat secara menyeluruh. Akibat dari adanya kekurangan yang dimiliki oleh suatu organisasi publik ini menjadi sebuah alasan utama harus dilaksanakannya kolaborasi dengan pihak lain untuk menunjang efektivitas dan optimalisasi pelaksanaan program kerja yang dimiliki. Suatu proses kolaborasi dengan pihak lain ini dapat diwujudkan dengan melaksanakan atau mengimplementasikan salah satu konsep

kolaborasi antar pihak yang biasa disebut dengan konsep Collaborative Governance.

Collaborative governance merupakan suatu konsep pola kolaborasi yang didalamnya melibatkan berbagai pihak lain diluar pemerintah untuk saling bekerjasama dalam menciptakan suatu pengambilan Keputusan yang efektif dan mencapai suatu tujuan bersama. Dalam pelaksanaan konsep collaborative governance ini, suatu organisasi publik akan diposisikan untuk berkolaborasi dengan menggunakan konsep kolaborasi penta helix, yaitu sebuah konsep kolaborasi yang melibatkan 5 pihak dengan latar belakang yang berbeda untuk saling berbagi pandangan dan informasi sesuai dengan fungsi dan wewenang yang dimiliki oleh masing – masing pihak. Kelima pihak yang terlibat dalam konsep kolaborasi penta helix ini antara lain pihak akademisi, pihak pemerintah, pihak komunitas masyarakat, pihak swasta / pelaku bisnis dan pihak media yang tentunya memiliki peran yang berbeda dalam proses kolaborasi yang dilaksanakan. Oleh karena itu, pelaksanaan atau implementasi konsep collaborative governance menjadi sangat penting bagi berjalannya roda organisasi publik dalam melaksanakan berbagai program kerja yang dimiliki karena akan meningkatkan proses implementasi program yang lebih luas dan terstruktur.

Dalam penelitian ini, kami memilih Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung sebagai contoh organisasi publik yang melaksanakan atau mengimplementasikan konsep collaborative governance dalam proses pelaksanaan berbagai program kerja yang dimiliki. Kami memilih Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung sebagai objek penelitian kami dalam tema collaborative governance ini karena kami merasa tertarik mengenai proses kolaborasi yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung dengan pihak lainnya. Seperti yang kita ketahui bersama, implementasi program dalam bidang budaya dan pariwisata tentunya memiliki cakupan yang sangat luas dan kompleks karena akan melibatkan berbagai pihak, berbagai indikator dan berbagai ilmu pengetahuan di dalamnya, sehingga diperlukan sebuah kolaborasi yang baik agar program kebudayaan dan kepariwisataan ini dapat dilaksanakan dengan tepat dan sesuai dengan tujuan. Dalam penelitian ini, kami akan mengukur seberapa baik dan efektif penerapan konsep collaborative governance yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung dengan pihak lainnya menggunakan teori collaborative governance yang dikemukakan oleh Ansell and Gash (2008).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu langkah atau upaya yang diambil oleh seorang peneliti sebagai tolak ukur dalam penelitian yang dilakukannya agar data yang diperoleh lebih efektif dan terstruktur. Menurut Sugiyono (2012), menyatakan metode penelitian merupakan langkah ilmiah agar memperoleh data dengan tujuan dan manfaat. Panjaitan & Ahmad (2017), metode penelitian merupakan suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan dengan menggunakan cara - cara ilmiah.

Dalam penelitian yang dilakukan berbagai jenis informasi diperoleh dari sumber data primer yaitu melalui wawancara, yaitu kegiatan percakapan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih atau antara pewawancara dan narasumber. Menurut Singh (2002), wawancara adalah situasi berhadapan - hadapan antara pewawancara dan responden yang dimaksudkan untuk menggali informasi yang diharapkan, dan bertujuan mendapatkan data tentang responden dengan minimum bias dan maksimum efisiensi. Sementara Steward & Cash (1982), mendefinisikan wawancara sebagai sebuah proses komunikasi dyad (interpersonal), dengan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, bersifat serius, yang dirancang agar tercipta interaksi yang melibatkan aktivitas bertanya dan menjawab pertanyaan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara melakukan sebuah wawancara dengan pihak atau narasumber yang telah dipilih sesuai dengan topik yang diteliti.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, teknik pendekatan penelitian yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif, yaitu sebuah pendekatan dalam penelitian yang dilakukan oleh seorang peneliti dengan cara menganalisis berbagai fenomena yang terjadi melalui berbagai data yang tersedia. Pradoko (2017), Penelitian kualitatif metode yang dilakukan oleh seseorang yang mampu mengambil data yang pada prinsipnya sebagai peneliti tunggal dalam segala aspeknya, walaupun di lapangan dapat dibantu oleh tim atau kelompoknya. Somantri (2005), Metode kualitatif merupakan pembangunan teori ilmu sosial serta metodologi dalam konteks ke-Indonesiaan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, teknik analisis data yang dilakukan adalah analisis deskriptif, yaitu sebuah cara menganalisis data dengan cara memahami isi data yang sudah terkumpul untuk mendapatkan sebuah kesimpulan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Peran Setiap Pihak Dalam Proses Pelaksanaan Konsep Collaborative Governance Di Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Bandung

Collaborative governance merupakan suatu konsep pola kolaborasi yang didalamnya melibatkan berbagai pihak lain diluar pemerintah untuk saling bekerjasama dalam menciptakan suatu pengambilan keputusan yang efektif dan mencapai suatu tujuan bersama. Dari definisi tersebut dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa pelaksanaan konsep collaborative governance membutuhkan bantuan atau peran dari banyak pihak diluar pemerintah untuk melaksanakan berbagai kegiatan pemerintah agar dapat terlaksana dengan lebih optimal dan memiliki gagasan yang luas dalam pelaksanaannya sesuai dengan peran dan wewenang yang dimiliki. Dalam pelaksanaan konsep collaborative governance ini biasanya akan menggunakan konsep atau teori kolaborasi penta helix, yaitu sebuah konsep kolaborasi yang melibatkan 5 pihak dengan latar belakang yang berbeda untuk saling berbagi pandangan dan informasi sesuai dengan fungsi dan wewenang yang dimiliki oleh masing – masing pihak. Kelima pihak yang terlibat dalam konsep kolaborasi penta helix ini antara lain pihak akademisi, pihak pemerintah, pihak komunitas masyarakat, pihak swasta / pelaku bisnis dan pihak media yang tentunya memiliki peran yang berbeda dalam proses kolaborasi yang dilaksanakan. Jadi dalam penelitian ini, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung sebagai salah satu perwakilan dari pihak pemerintah akan berkolaborasi atau dibantu oleh pihak lainnya yaitu akademisi, komunitas masyarakat, badan swasta dan pihak media untuk menjalankan berbagai program kerja yang dimiliki mengenai meningkatkan pengenalan budaya Kota Bandung ke masyarakat luas dan meningkatkan eksistensi berbagai destinasi wisata yang ada di Kota Bandung sehingga pelaksanaan program akan lebih terstruktur dan hasil yang diperoleh akan lebih optimal.

Di dalam pelaksanaan konsep collaborative governance melalui teori kolaborasi penta helix ini, tentunya akan ditemukan sejumlah peran dan tugas yang berbeda yang dimiliki oleh setiap pihak karena tentunya setiap pihak akan melakukan tugas dan perannya sesuai dengan fungsi dan wewenang yang dimiliki. Adanya keberagaman peran dan tugas yang dimiliki ini tentunya menjadi suatu hal yang sangat baik dalam pelaksanaan suatu program karena akan memudahkan setiap pihak dalam menjalankan tugasnya dan membuat setiap kekurangan yang dimiliki oleh setiap pihak dapat ditutupi dan dilengkapi oleh pihak lainnya sehingga pelaksanaan program ini dapat berjalan lebih optimal dan terancang dengan baik. Dalam penelitian yang telah dilakukan melalui media wawancara, terdapat beberapa peran yang dimiliki oleh setiap pihaknya dalam proses collaborative governance yang dilakukan di

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, antara lain :

1. Akademisi

Akademisi merupakan istilah yang merujuk kepada seseorang atau suatu kelompok yang memiliki pengetahuan atau intelektual yang tinggi dan biasanya berhubungan dengan dunia pendidikan. Konteks budaya dan wisata tentunya merupakan suatu konteks pembahasan yang harus memiliki pengetahuan secara mendalam di dalamnya karena melibatkan berbagai hal yang luas di dalamnya mulai dari sumberdaya, Sejarah, sampai keberadaan informasi yang akurat oleh karena itu diperlukan peran akademisi yang dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai kebudayaan dan kepariwisataan. Dalam penelitian yang telah dilakukan, ditemukan berbagai jenis peran yang dilakukan oleh sektor akademisi dalam kolaborasi yang dilakukan di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung seperti membantu Dinas kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung dalam memformulasi kebijakan yang akan digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan berbagai program sehingga lebih tepat dan sesuai dengan kondisi di lingkungan masyarakat, menciptakan masyarakat yang memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik mengenai sektor kebudayaan dan kepariwisataan dengan tujuan agar masyarakat dapat mendukung berbagai kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung dan dapat memiliki kepekaan untuk menjaga, melestarikan dan mempromosikan berbagai jenis budaya dan destinasi wisata yang ada di lingkungan Kota Bandung, dan membantu menyediakan sumber daya manusia yang memiliki keterampilan dan keahlian yang unggul khususnya di bidang kebudayaan dan kepariwisataan.

2. Swasta / Bisnis

Sektor swasta / bisnis merupakan suatu lembaga di luar pemerintah yang memiliki akses dan aktivitas yang bersifat lebih fleksibel karena tidak terikat oleh suatu aturan yang ketat dan tidak adanya akses kepemilikan yang bersifat tetap. Adanya bantuan yang diberikan oleh sektor swasta dalam berbagai program yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung merupakan hal yang sangat penting karena adanya sifat fleksibilitas yang dimiliki dapat membuat berbagai kekurangan yang dimiliki oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung dapat diatasi dengan cepat sehingga program yang dilaksanakan menjadi lebih optimal. Dalam penelitian yang telah dilakukan, ditemukan berbagai jenis peran yang dimiliki oleh sektor swasta dalam kolaborasi yang dilakukan di lingkungan Dinas Kebudayaan dan pariwisata Kota Bandung seperti membantu dalam menyediakan partisipasi sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk mendukung program yang dilaksanakan, membantu penyediaan modal yang diperlukan melalui kegiatan investasi karena seperti yang kita ketahui dana yang diperlukan dalam program

budaya dan wisata tergolong dana yang besar, dan membantu dalam penyediaan sarana prasarana yang dapat mendukung implementasi program menggunakan jasa yang disediakan sektor swasta sesuai dengan bidangnya masing – masing.

3. Pemerintah

Sebagai salah satu lembaga atau organisasi publik yang memiliki tanggung jawab yang besar dalam mengelola kepentingan negara dan masyarakat yang ada di dalamnya, tentunya peran atau posisi pemerintah ini menjadi suatu hal yang penting untuk dijalankan dengan baik, salah satunya dalam mengelola sektor budaya dan pariwisata di Indonesia. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung sebagai salah satu perwakilan pemerintah untuk mengelola sektor budaya dan pariwisata di lingkungan Kota Bandung tentunya tidak dapat melakukan berbagai program dengan sendiri, diperlukan suatu kolaborasi dengan pihak lain agar hasil yang dicapai dapat lebih maksimal. Dalam penelitian yang telah dilakukan, ditemukan berbagai peran yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung dalam kolaborasi yang dilakukan seperti melaksanakan kebijakan yang telah dirumuskan secara bersama – sama dengan pihak lain, melakukan pengawasan terhadap berbagai tugas yang dilaksanakan oleh pihak lain dalam program yang dilaksanakan, dan menyediakan berbagai fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program baik itu sumber dana, sarana prasarana, maupun sumber daya.

4. Komunitas / Masyarakat

Keberadaan komunitas atau masyarakat tentunya merupakan pihak yang tak kalah pentingnya dalam kolaborasi yang dilaksanakan, karena masyarakat memiliki posisi sebagai pihak yang akan merasakan langsung dampak yang timbul dari suatu program yang dilaksanakan. Oleh karena itu, diperlukan suatu partisipasi masyarakat melalui komunitas yang bergerak di bidang budaya dan pariwisata untuk mendukung program yang dilaksanakan sehingga dapat menciptakan hasil yang lebih maksimal. Dalam penelitian yang telah dilakukan, ditemukan berbagai peran yang dimiliki oleh komunitas dalam kolaborasi yang dilakukan di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung seperti menampung berbagai aspirasi yang dimiliki dan kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat Kota Bandung sehingga program yang dilaksanakan dapat sesuai dengan karakteristik yang dimiliki oleh masyarakat Kota Bandung, meningkatkan partisipasi dari masyarakat Kota Bandung agar dapat mendukung secara penuh dan ikut mempromosikan berbagai program yang dilaksanakan, dan ikut serta dalam memberikan informasi kepada masyarakat mengenai program apa saja yang dilaksanakan sehingga masyarakat dapat memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik.

5. Sektor Media

Media merupakan suatu alat yang dapat digunakan untuk menyampaikan berbagai informasi yang sedang terjadi kepada publik sehingga publik dapat mengetahui mengenai hal atau fenomena baru yang telah terjadi atau sedang terjadi. Dalam penelitian yang telah dilakukan, terdapat berbagai peran yang dimiliki oleh pihak media dalam kolaborasi yang dilakukan di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung seperti membantu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung dalam menyebarkan informasi terbaru mengenai kebijakan dan program yang dilaksanakan, ikut serta dalam menciptakan kondisi masyarakat yang memiliki informasi yang akurat, dan membantu dalam mempromosikan program yang dilaksanakan kepada pihak luar agar dapat dikenal dan memiliki daya tarik yang sangat menarik.

Dengan adanya berbagai peran yang terbagi dengan baik dan tepat kepada seluruh pihak yang terlibat sesuai dengan keahlian dan wewenang yang dimiliki diharapkan dapat menjadi suatu upaya yang dapat menciptakan kualitas pelaksanaan program yang lebih optimal dan dapat menciptakan hasil yang sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Selain itu, adanya pembagian peran dalam kolaborasi ini dapat menjadi sarana dalam melengkapi berbagai kekurangan yang dimiliki oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung sehingga pelaksanaan program dapat menjadi efektif dan efisien bagi terjaganya dan terlestariannya sektor budaya dan pariwisata di Kota Bandung.

Tingkat Efektifitas Proses Pelaksanaan Konsep Collaborative Governance Di Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Bandung

Untuk menilai Tingkat efektifitas dan keberhasilan pelaksanaan konsep collaborative governance yang dilaksanakan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung tentunya harus diperlukan teori sebagai alat ukur yang dapat menjadi bahan pertimbangan apakah pelaksanaan konsep collaborative governance dilakukan dengan baik atau buruk. Oleh karena itu, dalam penelitian ini kami menggunakan teori collaborative governance yang dikemukakan oleh Ansell and Gash (2008) sebagai sarana untuk mengukur efektifitas dan keberhasilan pelaksanaan konsep collaborative governance di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Di dalam teorinya, Ansell and Gash (2008) menyebutkan bahwa terdapat 5 indikator penting yang terbentuk dari adanya pelaksanaan collaborative governance, antara lain :

1. Adanya Dialog Tatap Muka yang Terjalin Antar Pihak

Adanya dialog tatap muka yang terjalin antar pihak menjadi indikator penting yang harus dilaksanakan dalam pelaksanaan collaborative governance yang dilakukan karena

sebagai salah satu upaya atau langkah dalam menyamakan cara pandang dan tujuan dalam pelaksanaan berbagai program yang akan dilakukan dan juga dapat menciptakan suatu hubungan awal yang baik antar pihak melalui komunikasi yang dilakukan melalui dialog tatap muka. Dalam kolaborasi yang dilakukan di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, terdapat dialog tatap muka yang dilaksanakan dengan seluruh pihak yang terkait baik dari sektor pemerintah, swasta, akademisi, komunitas dan media. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya penandatanganan atau pembentukan perjanjian kerjasama yang dilakukan dengan kelima pihak yang terlibat, adanya pembagian tugas dan peran sesuai dengan fungsi dan wewenang, serta adanya perumusan rencana implementasi program yang akan dilakukan sehingga proses kolaborasi dapat dilaksanakan dengan komitmen maksimal dari seluruh pihak yang terlibat. Dengan adanya bukti tersebut dapat disimpulkan bahwa proses kolaborasi yang dilakukan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung memenuhi indikator adanya dialog tatap muka yang terjalin antar pihak.

2. Terbentuknya Kepercayaan Antar Pihak

Keberadaan suatu kepercayaan yang timbul dan dirasakan oleh masing – masing pihak tentunya merupakan hal yang harus diperhatikan dalam berjalannya proses kolaborasi karena dengan adanya kepercayaan yang dirasakan maka setiap pihak akan melaksanakan peran dan tugasnya dalam proses kolaborasi dengan nyaman dan optimal. Dalam penelitian yang telah dilakukan, ditemukan informasi bahwa pada proses kolaborasi yang dilaksanakan di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung terdapat adanya suatu kepercayaan yang timbul dan dirasakan oleh setiap pihaknya. Hal ini tentunya dapat dibuktikan dengan setiap pihak yang saling memberikan dukungan dan selalu mengedepankan pencapaian atas tujuan yang telah direncanakan. Adanya kepercayaan ini timbul karena adanya komunikasi antar pihak yang berjalan dengan baik dan adanya kesamaan cara pandang serta tujuan yang ingin dicapai yang terjalin pada dialog tatap muka yang dilaksanakan pada pertemuan awal. Dengan adanya bukti tersebut dapat disimpulkan bahwa proses kolaborasi yang dilaksanakan seluruh pihak di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung ini memenuhi indikator terbentuknya kepercayaan antar pihak.

3. Adanya Komitmen Untuk Menjalankan Proses Sesuai Tujuan

Komitmen tentunya menjadi suatu hal penting yang harus diperhatikan dalam menjalankan proses kolaborasi karena menjadi sebuah pondasi atas pelaksanaan kerjasama yang akan dilakukan dari tahap awal hingga tahap akhir yaitu terciptanya suatu hasil. Dalam penelitian yang telah dilakukan, ditemukan informasi bahwa terdapat komitmen yang ditujukan oleh seluruh pihak pada proses kolaborasi yang dilakukan di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya

pelaksanaan tugas dan peran sesuai dengan apa yang telah dibagikan di awal perjanjian kolaborasi yang dilakukan dengan sangat baik oleh seluruh pihaknya mulai dari para akademisi yang ikut membantu memformulasikan kebijakan yang akan ditetapkan, sektor swasta yang mau melakukan investasi untuk pemenuhan modal yang dibutuhkan, komunitas yang membantu meningkatkan partisipasi masyarakat, pemerintah yang berkomitmen dalam melaksanakan berbagai program kebudayaan dan kepariwisataan, dan pihak media yang ikut membantu dalam menyebarkan informasi ke masyarakat luas. Adanya pemenuhan terhadap tugas dan peran yang telah diberikan tentunya menjadi suatu komitmen yang baik yang ditunjukkan oleh seluruh pihak dalam menjalankan seluruh tahapan pelaksanaan program dari awal hingga akhir. Dengan adanya bukti tersebut dapat disimpulkan bahwa proses kolaborasi yang dilakukan di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung telah memenuhi indikator adanya komitmen untuk menjalankan proses sesuai tujuan.

4. Terciptanya Rasa Saling Memahami

Adanya sikap saling memahami antar pihak tentunya menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan karena akan meningkatkan kualitas kolaborasi yang dilakukan, namun sering kali setiap pihak mengalami kesulitan dalam memahami pihak lainnya karena adanya sifat egoisme yang timbul. Dalam penelitian yang dilakukan, terdapat informasi bahwa terdapat kekurangan yang timbul dalam pemenuhan indikator menciptakan rasa saling memahami antar pihak yaitu adanya sifat egoisme yang saling ditunjukkan oleh setiap pihak dalam menjalankan proses kolaborasi. Hal ini biasanya terjadi dalam proses pengambilan keputusan seperti ada pihak yang tidak setuju dengan keputusan yang diambil oleh pihak lainnya dan tetap memaksakan keputusan yang dirasa benar oleh pihak tersebut. Adanya sifat egoisme ini biasanya terjadi karena adanya beberapa pihak yang ingin mengambil suatu keuntungan dari proses kolaborasi yang dilaksanakan. Dengan adanya bukti atau kekurangan tersebut dapat disimpulkan bahwa proses kolaborasi yang dilakukan di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung tidak memenuhi indikator terciptanya rasa saling memahami antar pihak.

5. Terciptanya Hasil Akhir yang Sesuai Tujuan

Adanya hasil akhir merupakan suatu bukti apakah proses kolaborasi yang dilakukan telah dilaksanakan dengan baik atau tidak, karena apabila proses kolaborasi tidak dilaksanakan dengan baik dan sesuai tujuan yang telah direncanakan maka hasil akhir tidak akan pernah tercipta. Dalam penelitian yang telah dilakukan, ditemukan informasi bahwa proses kolaborasi yang dilakukan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung telah menciptakan banyak hasil akhir yang dicapai dari pelaksanaan berbagai program yang

dimiliki. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya berbagai destinasi wisata yang dibuat dan dikembangkan, adanya berbagai ruang publik yang berkenaan dengan budaya dan kesenian di Kota Bandung, adanya berbagai kegiatan kebudayaan yang dilaksanakan dan terciptanya masyarakat yang mengenal dan dapat melestarikan budaya dan wisata di Kota Bandung. Dengan adanya bukti tersebut dapat disimpulkan bahwa kolaborasi yang dilaksanakan di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung telah memenuhi indikator terciptanya hasil akhir yang sesuai dengan tujuan.

Dalam Penelitian yang telah dilakukan dengan melakukan pengukuran mengenai efektifitas dan keberhasilan pelaksanaan konsep collaborative governance di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung dengan menggunakan alat ukur teori menurut Ansell and Gash (2008), dapat disimpulkan bahwa proses kolaborasi yang dilakukan oleh seluruh pihak telah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya pencapaian 4 indikator dari 5 indikator yang diukur yang membuktikan bahwa proses pelaksanaan konsep collaborative governance di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung merupakan bentuk kolaborasi yang efektif dan berhasil.

Kendala Yang Dihadapi Dalam Melaksanakan Konsep Collaborative Governance Di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung

Dalam pelaksanaan suatu kolaborasi yang melibatkan banyak pihak didalamnya terlebih dalam pengelolaan sektor budaya dan pariwisata yang akan mencakup berbagai hal yang luas dan mendalam mulai dari sumberdaya, Sejarah, sampai keberadaan informasi yang akurat, tentunya tidak akan berjalan dengan mudah melainkan akan terdapat banyak kendala yang menghambat jalannya kolaborasi baik itu yang disebabkan oleh kondisi internal maupun eksternal. Oleh karena itu, seluruh pihak harus mewaspadaikan adanya kendala yang dihadapi yaitu dengan cara terus melakukan komunikasi yang bersifat intens sehingga tidak akan terjadi suatu miss komunikasi dan tetap menjalankan berbagai peran dan tugas yang dimiliki sesuai dengan apa yang telah ditentukan sehingga jalannya kolaborasi dalam menjaga, melestarikan, dan mengembangkan sektor budaya dan pariwisata di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung dalam tetap berjalan dengan optimal dan sesuai dengan tujuan. Dalam penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh pihak yang terlibat dalam kolaborasi yang dilakukan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, antara lain :

1. Adanya Egoisme yang Ditunjukkan Oleh Masing – Masing Pihak

Dalam kolaborasi yang dilaksanakan dengan melibatkan banyak pihak tentunya akan

ditemukannya sifat egoisme yang ditunjukkan oleh setiap pihak yang terlibat karena terkadang terdapat beberapa tujuan internal masing - masing pihak yang ingin dicapai. Selain itu, terkadang juga terdapat suatu kondisi dimana tidak adanya cara pandang yang sama yang timbul dalam kolaborasi yang ditimbulkan karena adanya sikap saling membenarkan pandangan yang dimiliki oleh masing - masing pihak. Hal ini pun terjadi dalam proses kolaborasi yang dilaksanakan di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, dimana terdapat beberapa atau salah satu pihak yang menunjukkan sifat egoisme nya yang disebabkan oleh adanya keinginan untuk mencapai suatu keuntungan melalui tercapainya tujuan dan kepentingan pribadi organisasi dalam pelaksanaan program yang dilakukan. Tentunya adanya permasalahan ini menjadi suatu kendala yang dapat menghambat jalannya proses kolaborasi sehingga diperlukannya ketegasan melalui kesepakatan yang telah disetujui bersama agar setiap pihak dapat fokus menjalankan berbagai tugas dan peran yang dimiliki guna tercapainya hasil kolaborasi yang optimal dan sesuai dengan tujuan.

2. Adanya Regulasi yang Berbelit dan Tidak Sesuai

Suatu proses kolaborasi yang dilakukan tentunya akan diatur dalam sebuah regulasi yang ditetapkan agar dalam pelaksanaannya tidak ada pelanggaran yang dilakukan dan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam aturan. Namun di dalam kolaborasi yang dilakukan di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung ditemukan kendala dalam keberadaan regulasi yaitu adanya regulasi yang berbelit - belit dalam proses kolaborasi yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung dengan pihak lainnya. Contoh dari adanya regulasi yang berbelit ini seperti apabila ingin melakukan proses pembaharuan kolaborasi dengan dinas lainnya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung harus menunggu dan mengikuti proses pembaharuan kolaborasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung dengan Pemerintah lainnya. Adanya regulasi seperti ini tentunya menjadi hal yang dapat menghambat proses kolaborasi yang akan dilakukan karena diperlukan waktu yang panjang dan prosedur yang cukup ketat. Selain itu, keberadaan sifat regulasi yang dimiliki oleh pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung dengan regulasi yang dimiliki oleh sektor swasta memiliki beberapa perbedaan seperti regulasi yang dimiliki oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung sebagai organisasi publik bersifat lebih ketat sedangkan regulasi yang dimiliki oleh sektor swasta bersifat lebih fleksibel. Adanya ketidaksesuaian atau ketidakcocokan dalam regulasi yang dimiliki ini menjadi kendala dalam proses kolaborasi yang dilakukan karena biasanya sektor swasta sering merasa tidak nyaman dengan keberadaan regulasi organisasi publik yang bersifat ketat atau mengikat.

3. Adanya Keterbatasan dalam Kualitas Sumber Daya Manusia

Keberadaan sumber daya manusia yang memiliki kualitas unggul baik dari segi pengetahuan maupun keterampilan tentunya menjadi suatu hal yang penting untuk diperhatikan karena dengan adanya sumber daya manusia yang memiliki kualitas tentunya akan memudahkan juga dalam proses kolaborasi yang dilakukan. Namun dalam proses kolaborasi yang dilakukan di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung ini terdapat suatu kendala dalam kualitas sumber daya manusia yaitu adanya keterbatasan dalam kualitas sumber daya manusia yang dimiliki seperti yang terjadi dalam lingkungan masyarakat. Seperti yang kita ketahui, di lingkungan masyarakat tidak semuanya memiliki karakteristik maupun pengetahuan yang sama, namun terdapat sejumlah keragaman yang dimiliki seperti tidak semua masyarakat yang memiliki latar belakang pendidikan yang maksimal, tidak semua masyarakat memiliki pola pikir yang bersifat modern, tidak semua masyarakat memiliki kemampuan untuk memberikan pandangan terhadap suatu fenomena, tidak semua masyarakat memiliki keterampilan untuk menggunakan teknologi, dan lainnya. Adanya keterbatasan yang dimiliki ini menjadi suatu kendala dalam proses kolaborasi yang dilakukan yaitu kurang maksimalnya partisipasi masyarakat yang ditunjukkan dalam mendukung pelaksanaan program yang dilakukan karena kurangnya kualitas pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki. Oleh karena itu, diperlukan peran dari seluruh pihak yang terlibat khususnya pemerintah dan komunitas untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yaitu masyarakat sehingga dapat memiliki pengetahuan, pemahaman dan keterampilan yang baik untuk berpartisipasi dan mendukung jalannya proses kolaborasi dalam mengajaja, melestarikan dan mengembangkan sektor budaya dan pariwisata di Kota Bandung.

SIMPULAN

Colaborative governance merupakan suatu konsep pola kolaborasi yang didalamnya melibatkan berbagai pihak lain diluar pemerintah untuk saling bekerjasama dalam menciptakan suatu pengambilan keputusan yang efektif dan mencapai suatu tujuan bersama. Sektor pariwisata dan budaya merupakan 2 sektor yang dinilai memerlukan proses pemanfaatan collaborative governance karena didalamnya memuat berbagai hal yang luas dan mendalam mulai dari sumberdaya, Sejarah, sampai keberadaan informasi yang akurat. Oleh karena itu, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung sebagai lembaga yang memiliki tugas untuk mengurus persoalan budaya dan wisata melakukan kolaborasi dengan pihak lainnya yaitu sektor swasta, akademisi, komunitas dan media dalam menjalankan berbagai programnya dengan tujuan agar hasil yang dicapai dapat lebih optimal dan dapat

mencapai tujuan yang direncanakan. Dalam proses kolaborasi yang dilakukan oleh kelima pihak di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung dinilai telah menjadi proses pemanfaatan collaborative governance yang berjalan dengan efektif dan berhasil, yang dibuktikan melalui proses penilaian menggunakan teori yang dikemukakan oleh Ansell And Gash (2008). Hasil yang didapatkan dari penilaian tersebut menyebutkan bahwa adanya pencapaian 4 indikator dari 5 indikator yang diukur yang berarti bahwa proses pelaksanaan konsep collaborative governance di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung merupakan bentuk kolaborasi yang efektif dan berhasil.

Namun dari keberhasilan dan efektifitas yang dicapai dalam proses pelaksanaan konsep collaborative governance yang dicapai oleh seluruh pihak, masih terdapat beberapa kendala yang ditemukan dan menjadi penghambat dalam berjalannya proses kolaborasi yang dilakukan, yaitu adanya sifat egoisme yang timbul, adanya regulasi yang berbelit dan tidak sesuai serta adanya keterbatasan pada kualitas sumber daya manusia yang dimiliki. Dengan adanya beberapa kendala yang dihadapi tentunya diperlukan suatu Solusi yang dapat dilakukan agar kendala yang dihadapi dapat segera diatasi dan tidak menjadi suatu masalah yang berkepanjangan. Upaya yang dapat digunakan sebagai Solusi dalam mengatasi kendala tersebut seperti meningkatkan kualitas komunikasi yang dijalankan antar pihak sehingga lebih terciptanya rasa saling memahami antar pihak, adanya regulasi yang dibuat dengan mengedepankan nilai efektifitas dan efisiensi dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan melakukan sosialisasi dan pelatihan keterampilan di lingkungan masyarakat. Dengan adanya Solusi yang dilakukan tersebut diharapkan dapat mengatasi kendala yang dihadapi guna menciptakan kolaborasi yang dapat menciptakan hasil akhir yang optimal dan sesuai dengan tujuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, S., & Kusumastuti, R. (2024). Penerapan Penganggaran Pada Organisasi Sektor Publik Ikatan Pemuda Mahasiswa Koto Majidin-Jambi (IPMKM-J). *Profit: Jurnal Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 3(1), 120-124.
- Anggraini, A. M., Sari, R. M., & Fristiani, N. (2020). Implementasi Metode Balanced Scorecard Sebagai Tolok Ukur Pengukuran Kinerja Pada Organisasi Sektor Publik. *JCA (Jurnal Cendekia Akuntansi)*, 1(2), 58-70.
- Ariesmansyah, A. (2019). Collaborative Governance Pada Program Bandung Creative Belt Di Kota Bandung (Doctoral dissertation, Perpustakaan Pascasarjana).
- Ariesmansyah, A., Ariffin, R. H. B., & Respati, L. A. COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA. *Jurnal EL-RIYASAH*, 14(1), 58-72.
- Bustomi, T., Ariesmansyah, A., & Kusdiman, A. (2022). Partisipasi Publik Dalam Collaborative

- Governance Pada Program Sister City Bandung Dan Jepang Dalam Menanggulangi Sampah Di Kota Bandung. Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi, 13(1), 48-64.
- Demartoto, A. (2023). PENGEMBANGAN DIGITALISASI PARIWISATA BERBASIS COLLABORATIVE GOVERNANCE. Prosiding Konferensi Nasional Sosiologi (PKNS), 1(2), 207-211.
- Dewi, N. L. Y. (2019). Dinamika collaborative governance dalam studi kebijakan publik. Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial, 3(2), 200-210.
- Fajriah, L., & Hidayat, M. T. PENERAPAN BALANCED SCORECARD DALAM PENGUKURAN KINERJA ORGANISASI PUBLIK.
- Hakim, L. N. (2013). Ulasan Metodologi Kualitatif: Wawancara Terhadap Elit. Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial, 4(2), 165-172.
- Hardi, W. (2020). Collaborative Governance Dalam Perspektif Administrasi Publik.
- Kurniadi. 2020. Collaborative Governance Dalam Penyediaan Infrastruktur. Sleman : CV. Budi Utama.
- Kurniadi. 2021. Collaborative Governance Teori dan Implementasi. Banyumas : CV. Pena Persada.
- La Ode Syaiful Islamy, H. (2018). Collaborative governance konsep dan aplikasi. Deepublish.
- Lawasi, E. S., & Triatmanto, B. (2017). Pengaruh komunikasi, motivasi dan kerjasama tim terhadap peningkatan kinerja karyawan. Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan (JMDK), 5(1), 47-57.
- Mafaza, A., & Setyowati, K. (2020). Collaborative Governance Dalam Pengembangan Desa Wisata. Jurnal Kebijakan Publik, 11(1), 7-12.
- Marwiyah, Situ. 2023. Good Governance. Sleman : CV. Budi Utama.
- Nababan, S., Azizah, A. N., & Purnamasari, H. (2021). Kinerja dinas kebudayaan dan pariwisata kota Bandung dalam collaborative governance. KINERJA, 18(3), 409-415.
- Noor, M., Suaedi, F., & Mardiyanta, A. (2022). Collaborative Governance Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktik.
- Ratner. 2012. Collaborative Governance Assessment. CGIAR.
- Raushan, M. T. A. (2023). Collaborative Governance dalam pelaksanaan Bandung Calendar of Event 2022 (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).
- Sahir, S. H. (2021). Metodologi penelitian.
- Saleh, Choirul. 2020. Kolaborasi Pemerintahan. Tangerang : Universitas Terbuka.
- Sanyoto, Rohni, dkk. 2019. Kontestasi kepentingan dan Kolaborasi Tindakan. Jakarta. Penabulu Foundation.
- Winardi, J. (2006). Teori organisasi dan pengorganisasian.